

**SKRIPSI**

**ANALISIS ANGGARAN KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJENE**

***BUDGET ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE AT  
THE MAJENE REGENCY TRANSPORTATION SERVICE***



**HIKMAH PRATIWI**

**C02 18 358**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2023**

## **ABSTRAK**

**HIKMAH PRATIWI**, Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene, dibimbing oleh Taufik Hidayat B. Tahawa, SE.,M.AK. dan Sufyan Amirullah, SE.,M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Anggaran Kinerja Sektor Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene berdasarkan (1) Rasio Efektivitas (2) Rasio Kemandirian dan (3) Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan realisasi anggaran tahun 2018-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Majene 3 tahun terakhir dalam kondisi tidak efektif. Pengukuran anggaran kinerja menggunakan (1)Rasio Efektivitas dikategorikan kriteria tidak efektif. (2)Rasio Kemandirian memiliki kemampuan keuangan rendah sekali. (3)Rasio Pertumbuhan Pendapatan dinilai masih sangat rendah karena pendapatan asli daerah justru mengalami penurunan disetiap tahunnya.

**Kata Kunci :** Anggaran Kinerja Sektor Publik

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggaran dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional, yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional ini dengan penyusunan anggaran yang bersifat *line item budget*, yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran tahun berikutnya. (Nanda & Darwanis, 2016).

Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran pelayanan publik. (Mardiasmo, 2018).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna

anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (Nanda & Darwanis, 2016).

Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik memiliki peran utama dengan memberikan informasi Akuntansi yang relevan dan handal kepadapimpinan untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Anggaran atau sejumlah uang yang diperuntukkan untuk dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program dalam organisasi pemerintahan juga perlu direncanakan. Dengan adanya Akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab ke tingkat manajemen di bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan organisasi (Mandak, 2013). Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang dikoordinasikan secara sadar di antara dua orang atau lebih. Organisasi menggunakan tanggungjawab dan pengambilan keputusan untuk mengarahkan pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi (Novitasari, 2017).

Jika melakukan proses pengendalian biaya, manajemen suatu organisasi harus melakukan perbandingan secara terus-menerus biaya yang terjadi antara perencanaan dan pelaksanaan yang terjadi. Dari hasil membandingkan antara program atau anggaran yang telah disusun, manajemen akan dapat melakukan penilaian atas suatu efisiensi usaha pada organisasi tersebut. Anggaran dapat memberikan aspek motivasi bagi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja dari pimpinan pusat pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan atau anggaran biaya dan pelaksanaan atau realisasi biaya, pimpinan organisasi dapat menilai kinerja dari pimpinan suatu pusat pertanggungjawaban apakah mendapatkan penghargaan atau hukuman sesuai dengan prestasi (Mandak,2013).

Berdasarkan anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah terlebih dahulu harus memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Aspek yang diukur didalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah aspek keuangan yang berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja).

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara output dengan outcome yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. Anggaran berbasis kinerja dianggap penting, karena anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik (Nanda, 2016).

Menurut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat di pertanggungjawabkan, yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipersalahkan, dan yang mempunyai ketidakbebasan termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan (Mandak, 2013).

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kab. Majene, Dibentuknya Dinas Perhubungan Kab. Majene tidak serta diikuti oleh perubahan instansi, melainkan juga tahapan-tahapan instansi. Dinas perhubungan Kab. Majene dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP), Entitas Kab.Majene Nomor 62 Tahun 2017, Tentang pembentukan, rincian tugas dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas terminal pada Dinas Perhubungan Kab.Majene (Dishub Majene, 2017).

Dinas Perhubungan Kab. Majene merupakan kantor Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Perhubungan Kab. Majene memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kab. Majene, Sulawesi Barat. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan

administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dinas Perhubungan juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan lainnya.

Melalui Kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik raya diatur. Dinas Perhubungan rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan. Untuk wewenang, Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, Izin Operasi angkutan sewa, Izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek, Izin Operasi, Angkutan Taksi Antar Kota dalam Provinsi dan Lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2013 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Keuangan Negara telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan tahun 2006, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lagi peraturan mengenai ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja ini melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Permendagri, 2010).

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan, sehingga pada setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien pada saat pelaksanaan dan pencapaian suatu *outcome* (hasil) (Nanda, 2016). Hal ini menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Majene telah mengupayakan pelaksanaan anggaran, yang sesuai dengan prosedur. Sehingga Masyarakat tidak hanya dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Majene berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada. Berikut ini adalah data pendukung Dinas Perhubungan Kabupaten Majene (Dishub Majene, 2017).

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Majene 2018-2022**

| <b>Tahun</b> | <b>Anggaran</b>  | <b>Realisasi Anggaran</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2018         | 837.893.000,00   | 765.518.500,00            | 91%               |
| 2019         | 1.000.066.000,00 | 769.271.000,00            | 77%               |
| 2020         | 1.125.015.600,00 | 429.045.000,00            | 38%               |
| 2021         | 1.250.020.000,00 | 505.840.000,00            | 40%               |
| 2022         | 1.250.020.000,00 | 599.403.000,00            | 48%               |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majene 2023*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Majene tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majene dari tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Muh. Yusup., S.Pd selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Majene, diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah kurangnya anggaran yang diterima. Realisasi Anggaran tidak tercapai maksimal disebabkan oleh kurangnya (bus kota, bus AKAP dan bus AKDP masuk terminal), menurunnya jumlah kendaraan yang parkir di beberapa lokasi parkir karena faktor pandemi covid. Wabah Corona Virus disease (Covid-19) telah memberikan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan lembaga, khususnya pendidikan tinggi. Mengantisipasi penularan virus yang dimiliki pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti isolasi, *social and physical distancing* hingga pembatasan sosial berskala besar. Kondisi ini mengharuskan warganya untuk tinggal dirumah, bekerja, beribadah, dan belajar di rumah (Bahasoan et al., 2020). Serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman

masyarakat serta sikap apatis yang berkembang di masyarakat merupakan permasalahan-permasalahan yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat Kab. Majene terhadap parkir. Selain Dinas Perhubungan Kab. Majene harus dapat mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi penyebab merosotnya Pendapatan Asli Daerah.

Proses penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Majene dilakukan dengan menguraikan perbandingan antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan serta penyimpangannya. Sehingga Dinas Perhubungan dapat membandingkan antara anggaran dengan realisasinya, dan dapat menilai prestasi kerja masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan dengan jelas sebagai tolak ukur penilaian prestasi kerja akan mendorong motivasi kerja para karyawan untuk berkerja lebih baik dan lebih berprestasi.

Kelemahan yang dapat dilihat adalah beberapa pegawai yang menyusun anggaran tersebut memiliki kinerja yang tidak dapat diandalkan sehingga proses pelaksanaan anggaran tidak berjalan dengan baik, dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga mengurangi pendapatan, yang berakibat pada hasil pungutan retribusi anggaran tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan melihat pentingnya pertanggungjawaban anggaran maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Kab. Majene”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Anggaran Kinerja Sektor Publik pada Dinas Perhubungan Kab. Majene?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Anggaran Kinerja Sektor Publik pada Dinas Perhubungan Kab. Majene.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yakni dapat memberikan manfaat dari beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pembuktian keefektivan Anggaran Kinerja Sektor Publik pada suatu organisasi. Serta dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sector publik yang berkaitan dengan Analisis anggaran kinerja hingga dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat secara praktis hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang berguna mengenai anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kab. Majene.

### 2. Bagi Kantor Dinas Perhubungan Kab. Majene

Dengan diadakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan informasi tentang Anggaran Kinerja Publik pada Dinas Perhubungan Kab. Majene.

### 3. Bagi Sektor Publik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan informasi untuk instansi Sektor Publik, serta masyarakat luas pada umumnya, sehingga dapat mengetahui secara rinci mengenai anggaran kinerja sektor publik pada Dinas perhubungan Kab. Majene serta dapat menjadi bahan penelitian berikutnya terkait dengan Anggaran Kinerja Sektor Publik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Anggaran Kinerja Sektor Publik**

Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran, yang dimulai dengan pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan (Utari et al., 2016). Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perusahaan besar maupun kecil seharusnya membuat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan melihat kemasa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu organisasi. Sedangkan pengendalian melihat kebelakang, yaitu menilai hasil kerja dan membandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Faud, 2016). Anggaran adalah rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun. Program atau *strategicplan* yang telah disetujui pada tahap sebelumnya merupakan titik awal dalam mempersiapkan anggaran.

Setiap perusahaan menyusun anggaran sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan (Dewi Utari et al., 2016). Ada beberapa pengertian tentang anggaran, antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran dapat berupa anggaran fisik dan anggaran keuangan. Anggaran lazim disebut rencana kerja yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk angka-angka keuangan, lazim disebut anggaran normal.
2. Anggaran lazim disebut perencanaan dan pengendalian laba, yaitu proses yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif.
3. Anggaran adalah suatu perencanaan laba strategis jangka panjang, suatu perencanaan taktis laba jangka pendek; suatu sistem Akuntansi berdasarkan tanggung jawab; suatu penggunaan prinsip pengecualian yang berkesinambungan, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.
4. Anggaran adalah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan, dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.
5. Anggaran dapat dianggap sebagai sistem yang memiliki kekhususan tersendiri atau sebagai subsistem yang memerlukan hubungan dengan subsistem yang lain, yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.
6. Anggaran dianggap sebagai sistem yang otonom, karena memiliki sasaran serta cara-cara kerja tersendiri, yang merupakan satu kebulatan dan yang

berbeda dengan sasaran, serta cara kerja sistem lain yang ada dalam perusahaan; anggaran sekaligus juga disebut sub-sistem.

Indikator Kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah: (1) Kualitas Kinerja; (2) Kuantitas; (3) Ketepatan waktu; (4) Efektifitas; (5) Kemandirian (Robbins & Judge, 2016).

### **2.1.2 Model Penyusunan Anggaran Kinerja Sektor Publik**

Para penyusun anggaran menyusun anggaran berdasarkan teori, praktik, dan prediksi perubahan situasi ekonomi, sosial, dan politik (Dewi Utari et al., 2016). Penyusunan anggaran berdasarkan teori ialah pembuatan anggaran berdasarkan pengetahuan ekonomi perusahaan, dimana titik sentral perusahaan adalah mencari laba. Oleh sebab itu, laba harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian disusun strategi dan program kerja untuk mencapai sasaran laba.

Penyusunan anggaran berdasarkan praktik ialah pembuatan anggaran berdasarkan pengalaman praktik atau berdasarkan data historis. Data historis tersebut diolah secara ilmiah, kemudian dijadikan bahan untuk menyusun anggaran. Penyusunan anggaran berdasarkan prediksi perubahan situasi ekonomi, sosial, dan politik ialah pembuatan anggaran berdasarkan ramalan para ahli ekonomi, sosial, dan ahli politik. Para penyusun anggaran harus menyadari bahwa kondisi perusahaan ditentukan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Jika terjadi perubahan politik, maka akan terjadi perubahan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya akan menentukan aktivitas perusahaan. Bagi perusahaan yang

berskala internasional, perubahan kondisi politik global menjadi acuan pokok dalam penyusunan anggaran.

### **2.1.3 Prinsip Anggaran Kinerja Sektor Publik**

Anggaran kinerja sektor publik adalah sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian *outcome* dari *output* tersebut (Halim, 2017). *Output* dan *Outcome* tersebut dituangkan didalam target kinerja yang telah dibuat pada setiap unit kinerja. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai.

Berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, perlu diperhatikan prinsip anggaran berbasis kinerja. Prinsip anggaran berbasis kinerja (Halim,2017) adalah sebagai berikut:

#### **1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama, seperti pemerintah untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tersebut (Fauziah, 2018).

## 2. Displin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pos anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan dana pada setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan

## 3. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil, agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi didalam pemberian pelayanan.

## 4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan *stakeholders*.

## 5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 2.1.4 Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun dkk. (2015) pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu kita apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasi

strategi dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai :

1. Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan.
2. Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan
3. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja
4. Menunjukkan bagaimana mendukung organisasi
5. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif
6. Mengutamakan alokasi sumber daya
7. Meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan. (Hidayat, 2017)

#### **2.1.5 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja**

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Sedangkan Menurut (Dewi. F 2014), Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan botton up*)
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

#### **2.1.6 Manfaat Pengukuran Kinerja**

Adapun Manfaat pengukuran kinerja menurut (Dewi F. 2014) sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang di ukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

### 2.1.7 Informasi yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018), Dalam melakukan pengukuran kinerja, informasi yang digunakan sebagai berikut :

#### 1. Kelompok Finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada :

- a. Varians Pendapatan (*revenue variance*);
- b. Varians Pengeluaran (*expenditure variance*);
- c. Varians belanja rutin (*reccurent expenditure variance*);
- d. Varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*);

Setelah dilakukan analisis *varians*, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya *varians* dengan menelusuri *varians* tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya *varians* sampai tingkat manajemen paling bawah.

#### 2. Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah *Balance*

*Scorecard*. Dengan *Balance Scorecard* kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansial saja, tetapi juga aspek nonfinansial. Pengukuran dengan metode *Balance Scorecard* melibatkan empat aspek yaitu:

- a. Perspektif finansial (*financial perspective*)
- b. Perspektif kepuasan pelanggan (*customer perspective*)
- c. Perspektif efisiensi proses internal (*internal process efficiency*)
- d. Perspektif pembelajaran atau pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- a. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi;
- b. Sangat *volatile* dan dapat mengubah dengan cepat;
- c. Perubahannya tidak dapat diprediksi;
- d. Jika terjadi perubahan harus diambil tindakan segera;
- e. Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara (*surrogate*).

### **2.1.8 Analisis Rasio Keuangan**

Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha ataupun proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan.

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis rasio merupakan salah satu dari teknik analisis yang dapat memberikan petunjuk yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan antara variabel-variabel yang bersangkutan dan dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu. (Dewi M. 2017).

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga organisasi yang bersifat komersial. Adapun manfaat dari analisis rasio keuangan pemerintah daerah adalah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dipergunakan sebagai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan di daerahnya pada periode-periode selanjutnya. Menurut Kelfani, (2018) menyatakan bahwa ada beberapa manfaat dari analisis rasio keuangan antara lain : dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mengatur standar ukuran kinerja, dapat digunakan untuk menilai masa depan dan kredit/profitabilitas organisasi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah antara lain rasio efektivitas, pertumbuhan dan rasio kemandirian. Selain ketiga jenis rasio tersebut, analisis

laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data dari laporan arus kas dan neraca.

#### 1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan ditargetkan (Mahmudi, 2016).

#### 2. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah kesanggupan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintah yang meliputi pembangunan, ekonomi serta pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang bersedia membayarkan pajak serta retribusi daerah dan digunakan untuk menambah sumber PAD (Mauludin & Dewi, 2020).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan melalui besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber lain misalnya: bantuan pemerintah pusat/provinsi maupun dari pinjaman daerah. Rasio

kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah.

### 3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Apabila rasio pertumbuhan menunjukkan angka positif maka menggambarkan kinerja keuangan meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Menurut Kasmir (2013) rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kapasitas pemerintah daerah untuk mengimbangi dan meningkatkan pencapaian satu periode kemudian ke periode berikutnya. Semakin menonjol rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan dari pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah daerah tersebut dinyatakan baik (Wonda, 2016).

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang

bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD dan belanja operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti yang mempunyai keterkaitan judul dan topik yang akan di teliti mengenai Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik.

**Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu**

| <b>Nomor</b> | <b>Nama Peneliti</b>  | <b>Judul penelitian</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>   | <b>Persamaan</b>  | <b>Perbedaan</b>  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| 1.           | Krismanto Muliadi Manurung, Firda Mauliddina (Jurnal Global Manajemen, Vol. 10, Nomor2) 2021. | Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara. | Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Anggaran keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan sudah baik. | Kedua penelitian ini melakukan penelitian mengenai Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik. | Penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif dan deduktif dalam metode analisis data sedangkan penelitian sekarang analisis data dengan rasio. |
| 2.           | Reza Nanda, Darwanis (Jurnal Ilmiah Mahasiswa   | Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja   | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan  | Kedua penelitian ini melakukan penelitian   | Penelitian sebelumnya meneliti mengenai implementasi  |

|    |  |  |  |   |   |
|----|--|--|--|---|---|
|    | Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, Nomor 1) 2016.  | pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan).   | anggaran berbasis kinerja pada Dinas DPKKD Kab. Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.   | mengenai Anggaran Berbasis Kinerja.   | anggaran sedangkan penelitian sekarang hanya berfokus pada bagaimana anggaran kinerja sektor publik.  |
| 3. | Rahmia Hasniasari, Mahfud Sholihin (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 16, Nomor 1) Mei 2014. | Analisis Hubungan Penganggaran Partisipatif dan Kinerja: Pengujian Efek Mediasi Keadilan Persepsian dan Komitmen pada Lembaga Hukum Sektor Publik Indonesia. | Hasil dari kesimpulan lain yang didapatkan dari penelitian ini adalah bentuk keadilan persepsi yang memediasi partisipasi pada penganggaran dan komitmen untuk mencapai tujuan adalah keadilan prosedural. | Kedua penelitian ini melakukan penelitian mengenai Anggaran Berbasis Kinerja. | Penelitian sebelumnya menggunakan variabel hubungan antar penganggaran sedangkan penelitian sekarang hanya berfokus terhadap analisis anggaran kinerja sektor publik. |
| 4. | Nova Asteria Hastuti (Jurnal Akuntansi Unesa 2, 1-   | Peran Akuntansi Sektor Publik dalam  | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran   | Kedua penelitian ini melakukan penelitian                                     | Penelitian sebelumnya membahas mengenai peran ASP   |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
|    | 16) 2013.   | Perencanaan Anggaran Pada Kinerja Keuangan Daerah Kota Sidoarjo   | perencanaan keuangan di Sidoarjo sudah dinilai Efektif.   | mengenai Anggaran Berbasis Kinerja.   | dalam penganggaran sedangkan penelitian sekarang hanya meneliti mengenai anggaran kinerja sektor publik.  |
| 5. | Ali Tafriji Biswan, Iklima Devi Grafitanti (Jurnal Manajemen Perbendaharaan 2 (1), 35-56) 2021. | Memaknai kembali penganggaran berbasis kinerja berdasarkan studi implementasi penganggaran sektor publik. | Perilaku mendewakan anggaran bahwa tidak ada anggaran berarti kegiatan menjadi mati suri atau terhenti, anggaran yang tidak bisa diubah, serta anggapan bahwa hasil atau keluaran kegiatan harus bersifat administratif dan harus ada sebelumnya. | Kedua penelitian ini melakukan penelitian mengenai Anggaran Berbasis Kinerja. | Penelitian sebelumnya berfokus pada penelitian studi implementasi penganggaran sektor publik sedangkan penelitian sekarang hanya mendeskripsikan anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan. |

*Sumber: Hasil olahan penulis (2023)*

### 2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono, (2019) kerangka konseptual merupakan metode tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, maka dapat dilihat bahwa Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Kab. Majene menggunakan 3 rasio keuangan, yakni rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian. Dengan begitu, akan terlihat bagaimanakah Anggaran Kinerja pada Dinas Perhubungan Kab. Majene.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan Realisasi Anggaran Kinerja pada Dinas Perhubungan Kab. Majene. Penelitian kuantitatif berlandaskan positivistik (data konkret), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Nazir, 2014).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena atau fakta dengan menggunakan analisis (Sugiyono, 2013). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu ingin mengetahui anggaran kinerja pada Dinas Perhubungan Kab. Majene.

#### **3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Adapun rencana waktu penelitian akan dilaksanakan pada awal bulan Juni 2023.

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

| No | Keterangan                  | September 2022 |   |   |   | Mei 2023 |   |   |   | Agustus 2023 |   |   |   | September 2023 |   |   |   |
|----|-----------------------------|----------------|---|---|---|----------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|
|    |                             | 1              | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1              | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Penetapan Judul             | ■              |   |   |   |          |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |
| 2  | Permintaan Izin Penelitian  |                |   |   |   |          |   | ■ |   |              |   |   |   |                |   |   |   |
| 3  | Pengumpulan Data            |                |   |   |   |          |   |   |   | ■            |   |   |   |                |   |   |   |
| 4  | Pengelolaan Data            |                |   |   |   |          |   |   |   |              | ■ |   |   |                |   |   |   |
| 5  | Analisis dan Interpretasi   |                |   |   |   |          |   |   |   |              |   |   |   | ■              |   |   |   |
| 6  | Penyusunan Hasil Penelitian |                |   |   |   |          |   |   |   |              |   |   |   |                | ■ |   |   |

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono, (2017) terdapat 2 jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kab. Majene dalam bentuk informasi dan bukan angka. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa letak geografis, struktur organisasi serta peran masing-masing bagian yang ada di Dinas Perhubungan Kab. Majene. Sedangkan data kuantitatif berupa data dalam bentuk angka yakni Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Perhubungan Kab. Majene.

### **3.3.2 Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Fuadah, 2021). Data Primer dapat berupa opini subyek secara individual atau kelompok, dan observasi. Diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai dan Bendahara Dinas Perhubungan Kab. Majene.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis yang dapat memperkaya data primer (Arikunto 2013). Data Sekunder berasal dari survey lapangan dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, laporan maupun arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data. Sumber data berasal dari Dinas Perhubungan Kab. Majene berupa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Majene tahun 2018-2022.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti (Handayani 2020). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2022 pada Dinas Perhubungan Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat.

## **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian dari kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyonto 2015). Metode penarikan sampel yang digunakan yakni sampel jenuh. Sampel jenuh apabila dalam pengambilan sampel dengan jumlah populasi yang relatif kecil. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Perhubungan Kab. Majene tahun 2020-2022.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono, (2017) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung pada Dinas Perhubungan Kab. Majene untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam penelitian.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang dilakukan melalui seperangkat data terkait sampel penelitian.

### **3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel**

#### **3.6.1 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian suatu atribut atau sebuah sifat atau nilai-nilai seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya . Menurut (Sujarweni, 2014) menyatakan bahwa penelitian diklasifikasikan berdasarkan tingkat eksplansi salah satunya penelitian deskriptif yaitu, Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lainnya. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

#### **3.6.2 Defenisi Operasional Variabel**

Operasional variabel adalah defenisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

| Indikator   | Defenisi  | Rumus  | Skala |
|-------------|---|--|-------|
| Efektivitas | Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang diatur dibandingkan dengan target yang ditetapkan bergantung pada potensi asli. | $RE = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$                     | Rasio |
| Pertumbuhan | Rasio pertumbuhan (growth ratio), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.       | $RP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan/Belanja Pn-Po}}{\text{Realisasi Pendapatan/Belanja Po}} \times 100\%$ | Rasio |
| Kemandirian | Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,   | $RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$                                  | Rasio |

| Indikator | Defenisi   | Rumus | Skala |
|-----------|--|-------|-------|
|           | pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. |       |       |

*Sumber : Hasil olahan penulis (2023)*

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk mencapai manfaat penelitian terutama dalam memecahkan masalah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, metode analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan Anggaran Kinerja dengan menggunakan rasio keuangan daerah sebagai berikut (Siregar, 2015):

#### 1. Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk menghitung nilai rasio efektivitas, maka ditentukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas kinerja akan semakin baik, dan semakin rendah rasio efektivitas berarti akan semakin buruk. Untuk menilai tingkat rasio

Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Majene digunakan tabel sebagai berikut (Siregar, 2015):

**Tabel 3.4**  
**Penilaian Efektivitas**

| <b>Kriteria Efektivitas</b> | <b>Penilaian Efektivitas</b> |
|-----------------------------|------------------------------|
| Sangat Efektif              | Diatas 100%                  |
| Efektif                     | 90% - 100%                   |
| Cukup Efektif               | 80% - 90%                    |
| Kurang Efektif              | 60% - 80%                    |
| Tidak Efektif               | Kurang dari 60%              |

*Sumber: Mohammad Mahsun (2016)*

## **2. Rasio Kemandirian**

Menurut (Mauludin & Dewi, 2020) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah kesanggupan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintah yang meliputi pembangunan, ekonomi serta pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang bersedia membayarkan pajak serta retribusi daerah dan digunakan untuk menambah sumber PAD. Untuk menghitung nilai rasio kemandirian, maka digunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat rasio kemandirian Anggaran Kinerja pada Dinas Perhubungan Kab. Majene digunakan tabel sebagai berikut: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (Susanto, 2014).

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah**

| <b>Kemampuan Keuangan</b> | <b>Kemandirian%</b> |
|---------------------------|---------------------|
| Rendah Sekali             | 0-25%               |
| Rendah                    | 25-50%              |
| Sedang                    | 50-75%              |
| Tinggi                    | 75-100%             |

*Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (Susanto, 2014).*

### 3. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode berikutnya. Berikut rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan (Moeheriono, 2014) :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan/Belanja Pn} - \text{Po}}{\text{Realisasi Pendapatan/Belanja Po}} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn: Tahun awal, Po: Tahun Akhir

Untuk menilai tingkat rasio pertumbuhan Realisasi Anggaran pada Dinas Perhubungan Kab. Majene, digunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kriteria Tingkat Pertumbuhan**

| <b>Kriteria</b> | <b>Penilaian Pertumbuhan</b> |
|-----------------|------------------------------|
| Sangat Rendah   | 0 % - 10%                    |
| Rendah          | 11% - 20%                    |
| Sedang          | 21% - 30%                    |
| Tinggi          | Diatas 30%                   |

*Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (Susanto, 2014)*

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahasoan, A. N., Wulan A., Muhammad, M., & Aswar, R. (2020). Effectiveness of online learning in pandemic COVID-19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(2), 100–106.
- Dewi, M. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Smartfren Telecom, Tbk. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(1), 1-14.
- Fitriyani D. (2014). Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 1(1), 16-31.
- Faud, M. R. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Ambon. Ghalia Indonesia.
- Fauziah, I. (2018). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta. Ilmu Media (Serambi).
- Hidayat, B. (2017). Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard pada Koperasi Karyawan Tirta Mahakam di Bukuan. *Jurnal Ekonomia*, 6(2), 345-351.
- Kelfani (2018). *Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mardiasmo, M. B. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121.
- Moehariono, P. (2014). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi edisi revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 327–340.
- Nisa, K., Mustahal, M., & Fuadah, U. (2021). Evaluasi Program Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun Berbasis Daring di SMA Takhasus Al-Qur'an Wonosobo. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(6), 424-434.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian Cet. 9*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.

- Putri, D. K., Handayani, M., & Akbar, Z. (2020). Pengaruh media pembelajaran dan motivasi diri terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 649-657.
- Permendagri. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun*.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Jakarta. Penerbit Gaya Media.
- Siregar, S. (2015). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif di Lengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Versi 17*. Cet. II. Jakarta. Kencana.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Susanto, H. (2014). Analisis perkembangan kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Seminar Nasional UT 2014*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Cet 17. Bandung: Alfabeta.
- Suhaemin, S., & Arikunto, S. (2013). Manajemen perpustakaan di madrasah aliyah negeri Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 1(2), 252-268.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utari, D., Purwanti, A., & Prowironegoro, D. (2016). *Akuntansi Manajemen. Edisi 4 Pendekatan Praktis*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3). 192-200.
- Sumber lain:
- Dishub Majene. (2017). *Kantor Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Majene*.